

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KONSEP PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN WISATA AMPUPU KEBESANI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

1) Estherlina Sagajoka

e-mail: esthersagajoka@gmail.com

2) Reyna Virginia Nona

e-mail: reynamayosuku@gmail.com

3) Marselina Valentin

^{1,2,3} Universitas Flores

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Detukeli tentang Pelestarian dan Pengembangan hutan wisata Ampupu Desa Kebesani Berbasis kearifan lokal, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Detukeli, dengan sampel sebanyak 160 responden yang terdiri dari: tokoh adat (mosalaki), tokoh agama, masyarakat marginal (anakalo fai walu,) pengambil kebijakan, politisi, dan akademisi yang berasal dari wilayah Kecamatan Detukeli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,2 % responden setuju dengan konsep pelestarian dan pengembangan hutan wisata berbasis kearifan lokal, namun belum diaplikasikan secara baik dan benar dikalangan masyarakat, 26,1 % responden menyatakan setuju dan sudah mengaplikasikannya, dan responden yang menyetujui pernyataan ini didominasi oleh kalangan akademisi, 20,0 % responden tidak setuju dan tidak mengerti, Kemudian 6,7 % responden telah mengerti konsep pelestarian hutan wisata namun tidak setuju dengan konsep yang ditawarkan karena tidak paham, sehingga konsep pelestarian dan pengembangan hutan berbasis kearifan lokal perlu disosialisasikan secara baik, benar dan berkelanjutan kepada seluruh warga masyarakat. Rekomendasi yang diberikan adalah: 1) Sosialisasi harus diberikan oleh pihak yang berkompeten terhadap pelestarian dan pengembangan hutan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, 2). Sosialisasi harus mengakomodir/ bekerjasama dengan pemangku adat, pemimpin agama, pengambil kebijakan baik tingkat kecamatan dan kepala desa. Politisi dan akademisi, 3) Pengembangan pelestarian hutan menjadi destinasi wisata berbasis kearifan lokal perlu diperhatikan secara khusus terkait mitos dan budaya masyarakat adat Desa Kebesani, dimana pengembangan Hutan Ampupu menjadi destinasi wisata baru tetap dijaga dan dilestarikan sesuai budaya "Pire -Bhisagia" dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi aktivitas ekonomi bagi masyarakat desa kebesani dan sekitarnya sesuai pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Pelestarian, hutan wisata, kearifan lokal, pemangku kepentingan

Abstract

The purpose of this study was to determine the perception of the people of Detukeli District about the Preservation and Development of the Ampupu Tourism Forest in Kebesani Village. Based on local wisdom, using a qualitative descriptive method. The population in this study is the people of Detukeli District, with a sample of 160 respondents consisting of: traditional leaders (mosalaki), religious leaders, marginalized communities (anakalo fai walu,) policy makers, politicians, and academics who come from the Detukeli District. The results showed that 47.2% of respondents agreed with the concept of conservation and development of tourism forest based on local wisdom, but it has not been applied properly and correctly among the community, 26.1% of respondents agreed and had applied it, and respondents who agreed to this statement were dominated by academics, 20.0% of respondents disagree and do not understand, Then 6.7% of respondents have understood the concept of forest tourism preservation but do not agree with the concept offered because they do not understand, so the concept of forest conservation and development based on local wisdom needs to be socialized properly, true and sustainable to all citizens. The recommendations given are: 1) Socialization must be provided by competent parties on the preservation and development of sustainable forests based on local wisdom, 2). Socialization must accommodate/cooperate with traditional stakeholders, religious leaders, policy makers at both the sub-district and village levels. Politicians and academics, 3) The development of forest conservation into a tourist destination based on local wisdom needs to be paid special attention to the myths and culture of the indigenous people of Kebesani Village, where the development of the Ampupu Forest as a new tourist destination is maintained and preserved according to the "Pire-Bhisagia" culture and is expected to provide added value for economic activities for the village community of Kebesani and its surroundings in accordance with sustainable development.

Keywords: *Conservation, forest tourism, local wisdom, stakeholders*

I. PENDAHULUAN

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang sudah tidak asing bagi masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional karena menjadi salah satu sektor pendukung pembangunan masyarakat. Salah satu alternatif pariwisata berdasarkan konsep pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat lokal adalah dengan membentuk desa wisata, dimana proses pengembangan desa wisata dilaksanakan berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut, maka pemerintah Indonesia sudah meulai mengintensifkan pengembangan desa wisata sejak satu dasa warsa terakhir guna menjawab kegiatan pariwisata alternative (Herdiana, 2019). Adanya upaya pengembangan desa wisata juga dilatarbelakangi adanya kegiatan pemerintah untuk memberdayakan dana meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dimana masih banyak desa yang berstatus desa tertinggal. Hasil kajiann sektor unggulan dan sektor yang memiliki daya saing di Kabupaten Ende melalui pendekatan Shift Share adalah sektor Perdagangan hotel dan restoran, yang sangat erat kaitannya dengan sektor pariwisata, namun dari sektor unggulan

tersebut belum mampu membuka lapangan kerja baru sehingga walaupun unggul namun memiliki daya serap tenaga kerja yang rendah (Sagajoka & Banda, 2019). Berdasarkan temuan penelitian ini maka kebijakan pembangunan perlu memprioritaskan program kegiatan pada sektor-sektor yang memiliki daya saing dan unggul agar dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Pengembangan Hutan Wisata Ampupu merupakan potensi wisata alam yang perlu dikembangkan guna memberikan nilai tambah yang berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kebesani dan sekitarnya.

Hutan Wisata Kebesani secara administrasi, wilayah kekuasaannya berada di Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. Walaupun jauh dari ibukota kabupaten, namun hutan tersebut menjadi tempat perhentian dan peristirahatan sejenak bagi masyarakat Kecamatan Detukeli secara khusus dan masyarakat umumnya yang hendak berpergian dari dan menuju Kecamatan Detukeli. Hutan Wisata Kebesani terletak di puncak Kajundara, yang mana lokasi ini ditumbuhi ribuan pohon ampupu. Tanaman ini ditanam secara beraturan sehingga tumbuh secara berjejeran dan membuat setiap mata yang melewati lokasi tersebut menjadi terkesima dengan pemandangannya. Hal itulah yang membuat lokasi di sekitar hutan ampupu menjadi sejuk, dan strategis untuk dijadikan sebagai objek wisata, didukung dengan lembahnya yang sedikit curam dan kicauan burung Garugiwa yang saling bersahutan dapat menghanyutkan alam pikiran para pengunjung tentang problematika hidup yang sedang dihadapinya. Pengunjung dapat merasa nyaman berada di lokasi tersebut karena jauh dari bisingan kendaraan.

Selain memiliki Hutan Wisata Kebesani, desa tersebut juga memiliki kearifan lokal yang masih tetap terjaga sampai saat ini. Kearifan lokal dan sumber daya alam menjadi daya tarik wisata dan upaya perlindungan hutan (Hamdan et al., 2017; Suparmini et al., 2013). Demikian juga dengan kawasan Hutan Wisata Kebesani, dimana memiliki kekhasan yang dapat dijadikan obyek wisata sekaligus sumber penghasan yakni kerajinan anyaman dengan bahan dasarnya *Wugah* (daun lontar) yang dijadikan aneka barang seperti tempat sirihpinang yang digunakan untuk acara-acara adat, topi, tas, tempat tisu, vas bunga dan sebagainya untuk dipasarkan dan menambah nilai ekonomi serta mempertahankan nilai budaya masyarakat setempat. Nilai-nilai kearifan lokal inilah

yang menjadi fokus kajian ini dan yang membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya dimana kearifan lokal yang khas menjadi daya tarik wisata.

Daya tarik lokalitas memberikan pemahaman positif bagi tumbuhnya nilai kearifan lokal (*Local Wisdom*) dan nilai-nilai kehidupan yang memberi makna pada pola kehidupan dan interaksi sesama mereka. Nilai strategis budaya lokal menjadi sumber inspirasi daerah untuk mengembangkan potensi lokalitas terutama dalam pengembangan kegiatan pariwisata, upaya pelestarian nilai kearifan lokal ini menjadi hal yang penting agar kegiatan pariwisata tidak melupakan nilai budaya dan spirit lokal. Namun, masyarakat setempat belum mampu memanfaatkan kearifan lokal yang ada untuk menarik perhatian pengunjung di hutan wisata kebesani tersebut, Di sisi lain, perhatian pemerintah daerah juga belum maksimal sehingga kreatifitas masyarakat masih minim, infrastruktur jalan yang belum memadai, tidak tersedianya air minum bersih . Hal inilah yang menyebabkan kurannya pengunjung yang datang di tempat wisata tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan kajian untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang konsep pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata Ampupu Kebesani berbasis kearifan lokal, sehingga berdampak pada kebijakan guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kebesani dan sekitarnya. Pembangunan suatu kawasan atau daerah perlu dilakukan dengan mengetahui karakteristik wilayahnya, demikian juga dengan pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan lokal, maka perlu mengetahui karakteristik wilayahnya termasuk adat istiadat masyarakat setempat, sehingga pembangunan atau pengelolaan hutan menjadi tepat sasaran (Nona et al., 2018). Dengan demikian maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap konsep pelestarian Hutan Wisata Ampupu Kebesani berbasis kearifan lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pengelola Hutan Kebesani dan masyarakat setempat yakni sebagai informasi guna merumuskan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Wisata

Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI No. 68/Kpts II/1989, bab 1 ketentuan umum, pasal 1 ayat 1 tentang pengusahaan hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan tanam wisata: bahwa hutan wisata adalah kawasan hutan yang diperuntukan secara khusus, dibina, dan di pelihara untuk kepentingan pariwisata dan wisata buru, yaitu hutan wisata yang memiliki keindahan alam dan ciri khas tersendiri sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan budaya disebut taman wisata. Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, dinyatakan bahwa pengertian wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau kegiatan mempelajari keunikan yang ada pada daya tarik wisata yang dikunjungi pada jangka waktu yang sementara. Sementara itu Suyitno menyatakan bahwa wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang bersifat sementara serta untuk menikmati objek dan atraksi ditempat tujuan (Suyitno, 2006)

2.2 Kearifan Lokal

Kearifan lokal atau *local wisdom* merupakan gagasan-gagasan atau nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana penuh kearifan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Hermanto, 2017). Kearifan lokal adalah kebijakan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai leluhur tradisi budaya untuk mengatur tekanan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam suatu ekosistem masyarakat, dapat dihayati, dipraktekkan diajarkan dan diwrisakan dari generasi kegenerasi lainnya yang sekaligus membentuk menuntun pola perilaku manusia sehari-hari baik terhadap lingkungan. Kearifan lokal merupakan modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal di bangun dari nilai-nilai sosial yang di junjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan mamiliki fungsi sebagai pedoman pengontrol dan rambu-rambu

untuk berperilaku dalam berbagai kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam (Aprilia, 2015).

Konsep kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta di ekspresikan dalam tradisi dan mitor yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Jadi, untuk melaksanakan pembangunan disuatu daerah, hendaknya pemerintah mengenal lebih dulu seperti apakah pola pikir dan apa saja yang ada pada daerah yang menjadi sasaran pembangunan tersebut adalah sangat membuang tenaga dan biaya juga, membuat tempat wisata tanpa memberikan pembinaan kepada masyarakat setempat bahwa tempat tersebut adalah “ ikon” atau sumber pendapatan yang mampu mensejahterakan rakyat di daerah itu. Atau lebih sederhananya pembangunan dapat menjadi sia-sia jika pemerintah tidak mengenal masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan di daerah tersebut.

2.3 Pelestarian Hutan

Pelestarian dalam pengertian yang luas merupakan salah satu penerapan yang penting dari ekologi. Tujuan dari pelestarian yang sebenarnya adalah memastikan pengawetan kualitas lingkungan yang mengindahkan estetika dan kebutuhan maupun hasilnya serta memastikan kelanjutan hasil tumbuh-tumbuhan, hewan, bahan-bahan yang berguna dengan menciptakan siklus seimbang antara panen dan pembaharuan.

Sumber masalah kerusakan lingkungan terjadi akibat dilampaunya daya dukung lingkungan, yaitu tekanan penduduk terhadap lahan yang berlebihan. Kerusakan lingkungan hanyalah akibat atau gejala saja, karena itu penanggulangan kerusakan lingkungan itu sendiri hanyalah merupakan penanggulangan yang sistematis, penanggulangannya harus dilakukan lebih mendasar yang berarti menanggulangi penyebab kerusakan lingkungan karena itu sebab kerusakan lingkungan yang berupa tekanan penduduk terhadap sumber daya alam yang berlebih harus ditangani.

Perladangan berpindah sering dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di pedesaan. Pengaruhnya terhadap pelestarian hutan tidak akan besar karena dalam melakukan kegiatan

pada tanah yang tidak terlalu luas. Cara yang mereka gunakan biasanya tradisional dan usaha taninya bersifat subsistem dan mereka tidak menetap. Namun untuk perladangan yang luas perlu dilakukan usaha tani yang memenuhi kaidah-kaidah pelestarian hutan dan harus ada pencegahan perladangan berpindah. Banyak pohon yang ditanam untuk penghijauan dan reboisasi di matikan lagi oleh penduduk karena perpindahan lading dan pembukaan lahan baru, untuk itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk reboisasi adalah dengan sistem tumpang sari, dalam system ini peladng diperbolehkan menanam tanaman pangan di antara pohon dengan perjanjian petani memelihara pohon hutan yang ditanam dan setelah kira-kira lima tahun waktu pohon sudah besar petani harus pindah, namun dalam kenyataan banyak petani tidak memelihara pohon atau bahkan mematikan pohon tersebut karena dianggap mengganggu tanaman usaha taninya sehingga tidak jarang mereka menetap di tempat tersebut.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Purwowibowo dan Nur Dyah Gianawati tahun 2016 dengan judul Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Melalui Community Development menyimpulkan bahwa melalui kearifan lokal yakni pengetahuan masyarakat, kebudayaan, sumber daya, keterampilan dan proses-proses, serta pengembangan komoditas masyarakat lokal harus terus menerus dilakukan, sehingga pada akhirnya menghasilkan perlindungan hutan mangrove. Namun, kerusakan hutan mangrove yang diakibatkan oleh perbuatan masyarakat lokal ataupun orang-orang yang berasal dari luar daerah tersebut sehingga kerusakan hutan mangrove tidak dapat dielakkan lagi. Perlu adanya regulasi yang memperhatikan kearifan lokal serta dengan menerapkan prinsip *win win solution* terhadap komoditas terkait. Perlindungan hutan mangrove di daerah garis pantai dapat menjadi sabuk hijau dan media untuk berbagai jenis dari pemulihan sumber daya alam.

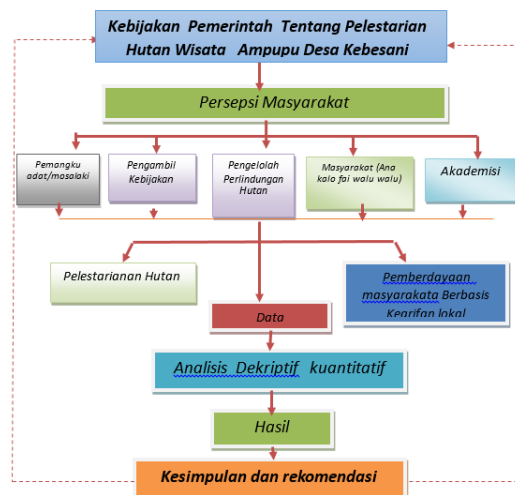
Penelitian dilakukan oleh Made Heny Urmila Dewi, dkk. tahun 2013, dengan judul Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali dan hasil pembahasannya adamenyimpulkan bahwa peran pemerintah terlihat dominan, padahal bila mengacuh pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan |peran dan

manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan Desa Wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Penelitian dilakukan oleh Neneng Komaria, dkk.tahun 2018, dengan judul Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal dan menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata Argo di Kabupaten Pangandaran tertuang dalam prinsip-prinsip keorganisasian. Terdapat 3 prinsip pokok keorganisasian yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis dan kemandirian. Keriteria Desa Wisata meliputi daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata, pemberdayaan masyarakat, dan pemasaran atau promosi. Terdapat dua kriteria yang sudah berjalan maksimal yakni daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan ke-3 kriteria lainnya masih memperoleh kendala.

2.2 Model Penelitian:

Gambar 1. Model Penelitian



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey dengan metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2019).

3.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende yang merupakan daerah yang memiliki banyak daya tarik untuk kegiatan wisata namun, belum dikembangkan secara baik karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pelestarian dan keberlanjutan hutan wisata berbasis kearifan lokal .

3.2 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Kecamatan Detukeli yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan yang terdiri dari : tokoh adat, tokoh agama, Pengambil kebijakan (kepala Dinas Kehutanan (pengelola hutan Wisata), camat, kepala desa, politisi, akademisi dan Masyarakat (*ana kalo faiwalu*)

3.3. Sample

Mengingat terbatas waktu, maka tidak semua wilayah diteliti sebagai obyek penelitian. Untuk mendapatkan sampel digunakan teknik pengambilan sampel acak berdasar area (*Clauster random sampling* merupakan teknik sampling secara berkelompok , pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan kelompok /area tertentu, untuk meneliti tentang hal tentang bagian yang berbeda dalam dalam sustu instansi. Penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus Yamane (Rakhmat, 2009) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d^2 = Presisi yang ditetapkan (10%).

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel jumlah 160 orang, dengan pengambilan secara *proportional random sampling* dengan mempertimbangkan keterwakilan setiap unsur masyarakat di Kecamatan Detukeli Desa Kebesani yang terdiri dari :tokoh adat, tokoh agama, pengambil kebijakan (kadis kehutanan sebagai pengelola Hutan Wisata Desa Kebesani, Camat Detukeli dan jajarannya kepala desa dan aparat desa, masyarakat (*ana kalo fai walu*), dan para akademisi dan politisi yang berasal dari wilayah Kecamatan Detukeli, dan total responden sebanyak 160 orang.

3.4. Pengukuran Variabel Penelitian

Kuesioner dengan skala Likert adalah instrumen yang umumnya digunakan untuk meminta responden agar memberikan respon terhadap beberapa pernyataan dengan menunjukkan apakah dia setuju tapi belum mengaplikasikan, tidak setuju, sangat tidak setuju terhadap tiap-tiap *statement* (Arikunto, 2019). Pengukuran variable yang diukur dalam penelitian ini adalah variable persepsi masyarakat kecamatan Detukeli tentang konsep Pelestarian dan pengembangan hutan wisata Ampupu desa Kebesani. Selanjutnya kedua dimensi utama berkaitan dengan konsep Pelestarian dan pengembangan hutan wisata berbasis kearifan lokal dijabarkan kedalam 9 (Sembilan) pertanyaan, untuk variabel harapan dan variabel persepsi yang tidak disusun dalam pernyataan-pernyataan berdasarkan skala Likert, dari 0 (tidak mempunyai jawaban) sampai 5, untuk kemudian diajukan kepada responden.

3.5. Indikator Variabel Penelitian

Indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat kecamatan Detukeli tentang Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan wisata ampupu desa kebesani antara lain:

a) Keandalan (*reliability*)

Kecepatan pelayanan, keakuratan data yang diinformasikan, kesesuaian persepsi yang diberikan dengan yang dibutuhkan pengguna, bebasnya data yang diinformasikan dari kesalahan, dan keandalan persepsi masyarakat yang bersangkutan.

b) Daya anggap (*responsiveness*)

Menunjukkan kemauan baik dengan cara memberitahu dan melayani dan kesiapsediaan dan ketuntasan menjawab semua pertanyaan pengguna, kesediaan menyediakan waktu khusus untuk pelayanan, kesediaan memberikan pelayanan dengan segera, kemauan membantu pengguna dan simpatik kepada pengguna.

c) Jaminan (*assurance*)

Memiliki ketarampilan dalam memberikan pelayanan, kemampuan membantu pengguna dalam menuntaskan masalah yang terkait dengan persepsi masyarakat pengguna, kesediaan mendahulukan kepentingan pengguna, kemampuannya dipercaya oleh pengguna dan jaminan keamanan.

d) Empati (*empathy*)

Kebutuhan penggunaan, tersedianya waktu pelayanan secara memadai. Bantuan dalam penyelesaian kesulitan/masalah, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, kemudahan untuk dihubungi, kesesuaian waktu pelayanan dan kepentingan dengan pengguna.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi kepustakaan, wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner.

a) Metode Studi Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian. Dokumen tersebut meliputi laporan dan atau berbagai artikel dari majalah, Koran atau jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk mendapatkan data skunder.

b) Metode Penyebaran Kuesioner

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk angket atau kuesioner. Jenis kuesioner ini adalah kuesioner tertutup dengan skala likert. Kuesioner tertutup koesioner yang sudah disediakan jawabanya sehingga responden dapat memilih pada kolom yang sudah disediakan dengan memberi tanda cross (X) (Arikunto, 2019). Adapun sebagai alasan bahwa digunakan koesioner tertutup karena (1) memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban, (2) lebih praktis dan sistematis, (3) keterbatasan waktu penelitian.

c) Metode Wawancara.

Untuk memperoleh data primer maka dilakukan wawancara langsung dengan mendatangi responden berdasarkan kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah di persiapkan sebelumnya.

d) Wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informasi kunci (*key informan*), dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang lengkap atas respon yang diberikan oleh informen sampai diperoleh informasi yang lengkap yang sesuai dengan tujuan penelitian.

e) Observasi, yaitu suatu pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan untuk menguji dan melengkapi data lainnya.

3.7. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan skala likert 5. Skala Likert merupakan skala yang paling banyak digunakan untuk pengukuran sikap maupun persepsi. Tanggapan skala likert 5 yaitu Sangat setuju (Suryana et al.), Setuju (S), Biasa (B), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS) secara berturut-turut bernilai : 5,4,3,2,1. Pertanyaan dalam item-item *favorable* mengandung nilai-nilai positif sampai item-item *unfavorable* yang mengandung nilai negatif (Alma & Sunarto, 2007). Data yang diperoleh dilakukan *editing*, untuk mengecek kelengkapan kuisisioner, setelah itu dilakukan *coding* dibuku kode untuk mempermudah pengolahan data, sistem *scoring*, dibuat konsisten yaitu semakin tinggi skor semakin tinggi kategorinya. Setelah itu dijumlahkan dan selanjutnya dikategorikan teknik *scoring* secara Normatif yang dikategorikan berdasarkan interval kelas sebagai berikut:

$$n = \frac{Max - Min}{\sum k}$$

Keterangan:

N = batas selang

Max = Nilai Maksimum yang diperoleh dari jumlah skor

Min = Nilai Minimum yang diperoleh dari skor

$\sum k$ = Jumlah kategori

3.8. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data dan kegiatan penelitian, selanjutnya dilakukan kegiatan menganalisis data. Kegiatan menganalisis data ini terdiri dari Tiga tahap yaitu:

1. Tahap persiapan :

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan antara lain: (1). Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden, (2) memeriksa isi instrumen pengisian data, (3). Mengecek isian data.

2. Tahap tabulasi kegiatan tabulasi adalah kegiatan mengelompokkan data ke dalam tabel frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisis. Kegiatan tabulasi dalam hal ini yaitu:
 - a. *Coding* yaitu pembahasan kode untuk setiap data yang telah diedit.
 - b. *Scoring* adalah pemberian skor terhadap jawaban responden untuk memperoleh data yang kuantitatif yang diperlukan. Pada penelitian ini digunakan skala Likert yang sudah dimodifikasi untuk menentukan skor. Dalam skala Likert jawaban yang diberikan semua mempunyai persepsi positif atau favorable. Jadi setiap pertanyaan tersebut diberikan 5 jawaban pilihan yang sesuai dengan inti masalah dalam pertanyaan tersebut. Masing-masing jawaban diberi nilai skor 0 sampai 5.
 - c. Tahap Penerapan Data
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dengan menggunakan teknik tabulasi, dengan menyajikan hasil penelitian tabel-tabel distribusi, frekuensi dengan prosentasi untuk masing-masing kelompok. Alat yang digunakan untuk mengolah data adalah software program Excel.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Hasil pengolahan data yang diberikan responden melalui angket, diperoleh jawaban mengenai topik-topik permasalahan. Hasil tabulasi dijadikan dasar dalam menyusun temuan penelitian yang kemudian ditarik kesimpulan penelitian serta rekomendasi sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

Berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat dideskripsikan Persepsi kecamatan Detukeli sebagai berikut :

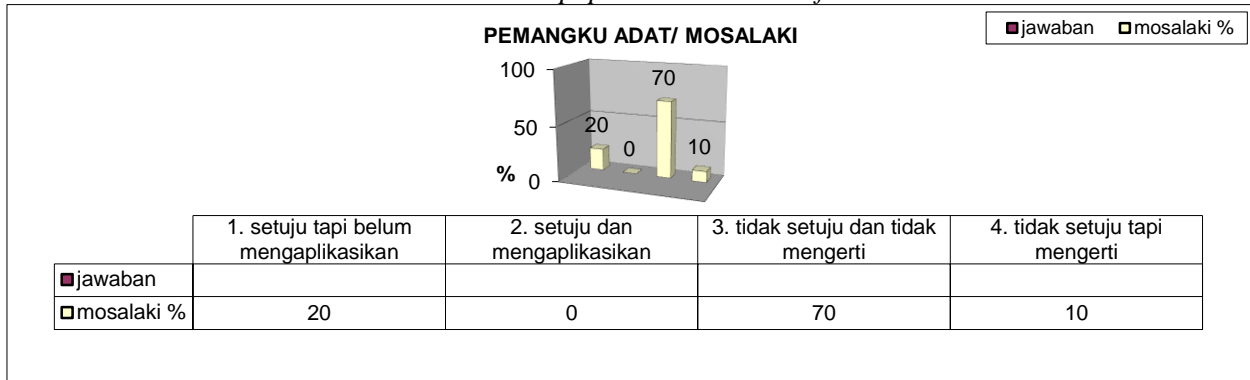
4.2.1. Persepsi Pemangku Adat Terhadap Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Desa kebesani Berbasis Kearifan Lokal

Persepsi pemangku adat tentang konsep Pelestarian dan Pengembangan hutan Wisata Ampupu desa Kebesani kecamatan Detukeli 20 (dua puluh) responden, menunjukkan, 20% responden atau sebanyak 4 responden mengatakan setuju dengan konsep Pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata Kebesai berbasis kearifan lokal namun menurut para pemangku adat, konsep tersebut belum diaplikasikan secara baik dan benar dikalangan masyarakat. 70 % responden atau sebanyak 16 responden, menyatakan tidak setuju dan tidak mengerti, sedangkan 10% atau sebanyak 2 orang responden menyatakan bahwa tidak setuju dengan konsep yang pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata Ampupu namun mereka mengerti. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pemangku adat di Kecamatan Detukeli belum sepenuhnya mengerti tentang konsep pelestarian dan pengembangan hutan berbasis kearifan lokal. Hal ini berarti pula terdapat adanya kecenderungan menjadi faktor penghambat dalam upaya pelestarian dan pengembangan hutan wisata ampupu ke depan.

Kebijakan terhadap pengelolaan hutan dan sumber daya alam umumnya tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi diperlukan dukungan masyarakat. Program pembangunan yang memanfaatkan sumber alam secara lestari perlu didukung dengan pemahaman yang baik dari seluruh pihak yang berkepentingan, seperti pemangku adat. Pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dari kawasan konservasi (Leftungun et al., 2021) (Leftungun et al., 2021).

Persepsi pemangku adat/ Mosalaki terhadap konsep pelestarian dan pengembangan hutan wisata berbasis kearifan lokal dipaparkan pada Grafik 4.1.

Grafik 4.1.
 Persepsi Pemangku adat/ Mosalaki Terhadap Konsep Pelestarian dan pengembangan Hutan wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal



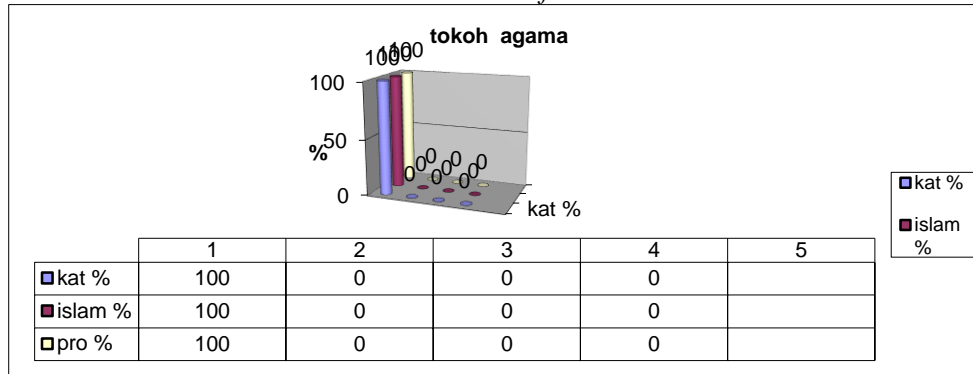
Sumber: Hasil Penelitian 2022

4.2.2. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal

Persepsi Tokoh Agama terhadap konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan wisata berbasis kearifan lokal, dari hasil pengolahan data diperoleh 100% responden menyatakan setuju dengan konsep pelestarian dan pengemabngan hutan wisata namun belum diaplikasikan secara baik dan benar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemimpin agama di kabupaten Ende, (Agama Katolik, Islam dan Kristen Protestan) mengerti dan paham tentang konsep pelestarian dan pengembangan hutan berbasis kearifan lokal.

Tokoh agama merupakan tokoh masyarakat yang dapat menjadi agen informasi bagi pembangunan di daerah. Peran serta para stakeholder termasuk tokoh agama sangat diperlukan. Tokoh agama merupakan stakeholder yang turut berperan dalam memberikan kesadaran bagi masyarakat guna menjaga dan mengelola lingkungan alam termasuk hutan secara baik. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soerjonno, 2004). Demikian halnya dengan tokoh agama, menjalankan perannya sebagai stakeholder, yang meliputi mengemukakan peran stakeholder dalam program pengembangan pariwisata meliputi: 1) Policy creator, 2) Koordinator, 3) Fasilitator, 4) Implementer, dan 5) Akselerator (Nugroho, 2014). Secara rinci persepsi pemimpin agama dapat dibaca pada grafik 4.2

Grafik 4.2.
 Persepsi Tokoh Agama Terhadap Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal



Sumber: Hasil Penelitian 2022

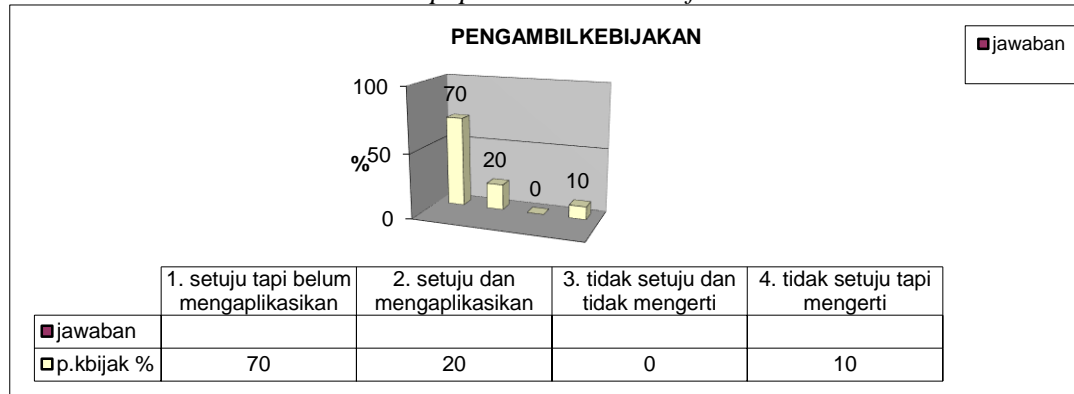
4.2.3. Persepsi Pengambil Kebijakan Terhadap Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal

Persepsi pengambil kebijakan terhadap konsep Pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata Ampupu Desa Kebesani bahwa dari 50 responden, menunjukkan 70% responden atau sebanyak 35 responden mengatakan bahwa setuju dengan konsep, tapi belum diaplikasikan secara baik dan optimal dikalangan masyarakat, kemudian 20 % atau sebanyak 10 responden, mengatakan setuju dengan konsep tersebut dan sudah mengaplikasikan dan 10 % atau sebanyak 5 responden mengatakan tidak setuju dengan konsep, Hal ini mengindikasikan bahwa pengambil kebijakan di Kabupaten Ende memahami dan mengerti tentang konsep pelestarian dan pengembangan hutan berbasis kearifan lokal namun belum optimal diaplikasikan di masyarakat.

Pengambil kebijakan merupakan Stakeholders kunci yakni mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Pengambil kebijakan dalam penelitian ini merupakan stakeholder kunci yakni yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Secara rinci persepsi pengambil kebijakan terhadap konsep pelestarian dan pengembangan hutan wisata ampupu desa kebesani dipaparkan pada Grafik 4.3.

Grafik 4.3.

Persepsi Pengambil Kebijakan Terhadap Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal



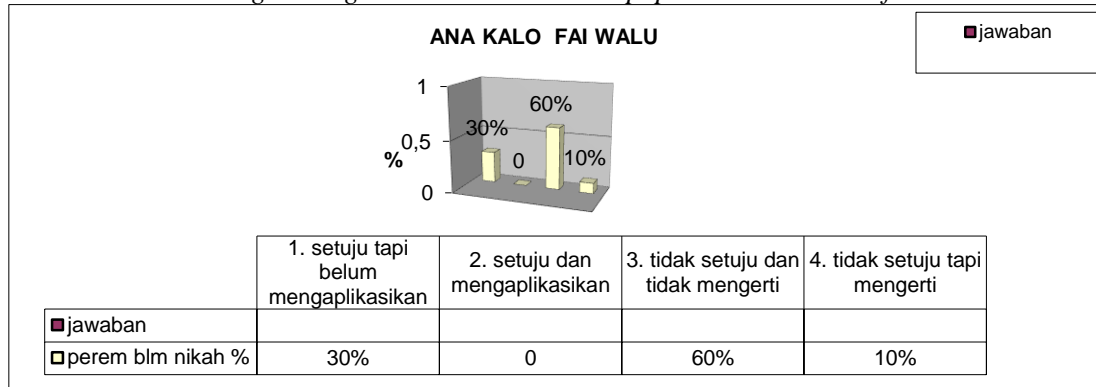
Sumber: Hasil Penelitian 2022.

4.2.4. Persepsi Masyarakat Marginal (*ana kalo Fai walu*) Terhadap Konsep Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal

Hasil analisis terhadap persepsi masyarakat marginal (*ana kalo Fai Walu*) menunjukkan bahwa terdapat 30% responden yang setuju terhadap pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata Ampupu Desa Kebesani berbasis kearifan lokal namun belum diaplikasikan secara baik dan benar dimasyarakat. 60 % responden menyatakan tidak setuju dan tidak mengerti, sedangkan 10 % responden menyatakan bahwa tidak setuju dengan konsep pelestarian hutan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat marginal (*anakalo fai walu*) Kecamatan Detukeli tidak setuju dan tidak mengerti tentang konsep pelestarian dan pengembangan hutan berbasis kearifan lokal. Ketidaksetujuan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman yang kurang terhadap konsep pelestarian hutan berbasis kearifan lokal. Peran pemerintah dan stakeholder menjadi penting guna memberikan sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya konsep pelestarian hutan dan kearifan lokal yang harus terus dijaga bagi bagi kelompok marginal. Dalam hal ini Peran stakeholder dalam program pengelolaan hutan adalah sebagai fasilitator (Nugroho, 2014).

Grafik 4.4 berikut ini akan menggambarkan persepsi masyarakat marginal terhadap konsep pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata.

Grafik 4.4.
 Persepsi Masyarakat Marginal (ana kalo fai walu) Terhadap Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Berbasis Kearifan Lokal

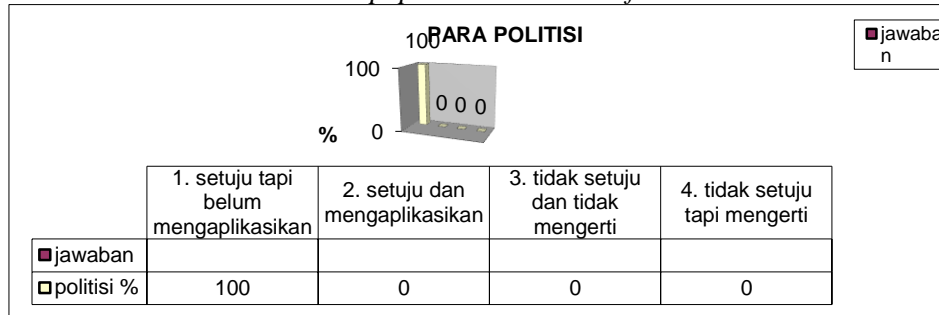


Sumber: Hasil Penelitian 2022

4.2.5. Persepsi Politisi Kecamatan Detukeli Terhadap Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Kebesani Berbasis Kearifan Lokal

Persepsi Politisi terhadap konsep Pengembangan dan Pelestarian Hutan Wisata Desa Kebesani berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa 100% responden setuju dengan konsep Pelestarian dan pengembangan hutan wisata tersebut, namun konsep belum diaplikasikan secara baik dan benar dikalangan partai politik dimasyarakat. Data ini mengindikasikan bahwa Politisi di Kecamatan Detukeli mengerti dan paham tentang konsep pelestarian dan pengembangan hutan wisata berbasis kearifan lokal namun belum secara optimal mengaplikasikannya dalam berbagai kebijakan dan menjadi patner pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dalam hal ini maka politisi menjalankan fungsinya sebagai stakeholder yakni sebagai *Policy creator* (Nugroho, 2014). Secara rinci persepsi politisi dipaparkan pada Grafik 4.5.

Grafik 4.5
 Persepsi Politisi Kecamatan Detukeli Terhadap Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal



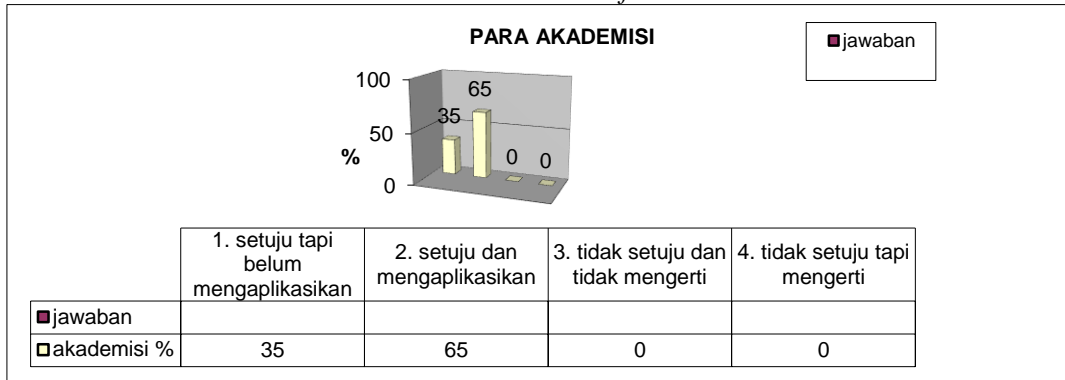
Sumber: Hasil Penelitian 2022

4.2.6 Persepsi Para Akademisi Terhadap konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal

Persepsi para akademisi terhadap konsep Pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata Ampupu berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa 35 % atau sebanyak 7 (tujuh) responden menyatakan setuju terhadap konsep pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata Ampupu Kebesabi, namun belum diaplikasikan. 65% atau sebanyak 13 (tiga belas) responden menyatakan setuju dengan konsep dan sudah mengaplikasikan. Berdasarkan hasil analisis ini maka diketahui bahwa para akademisi di Kecamatan Detukeli sangat paham tentang konsep pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata Ampupu Kebesani dan sudah mengaplikasikan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Akademisi berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat guna mempercepat pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal (Agus, 2011). Secara rinci persepsi para akademisi dipaparkan pada Grafik 4.6.

Grafik 4.6.
 Persepsi Akademisi Terhadap Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Berbasis Kearifan Lokal



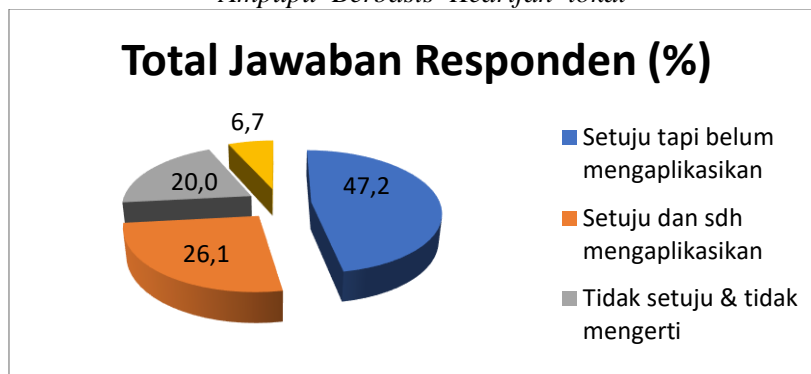
Sumber: Hasil Penelitian 2022

4.2.7. Persepsi Masyarakat Kecamatan Detukeli Secara Umum Terhadap konsep Pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal

Berdasarkan hasil pengolahan data secara umum persepsi masyarakat Kecamatan Detukeli terhadap konsep Pelestarian dan pengembangan hutan wisata desa Kebesani berbasis kearifan lokal pada periode pengamatan, dari total 160 responden mengatakan sebagai berikut : Berdasarkan hasil olahan data secara keseluruhan menunjukkan bahwa sebesar 47,2 % responden mengatakan bahwa mereka setuju dengan konsep pelestarian dan pengembangan hutan wisata berbasis kearifan lokal , namun belum diaplikasikan secara baik dan benar dikalangan masyarakat. 26,1 % menyatakan bahwa setuju dan sudah mengaplikasikannya, dimana prosentase terbanyak dari kalangan akademisi, selanjutnya 20,0 % responden menyatakan tidak setuju dan tidak mengerti, dan 6,7 % mengatakan mengerti dengan konsep tersebut namun tidak setuju dengan konsep yang ditawarkan karena faktor ketidaktahuan. Sehingga masyarakat megharapkan agar Pengembangan pelestarian hutan menjadi destinasi wisata berbasis kearifan lokal perlu diperhatikan secara khusus terkait mitos dan budaya masyarakat adat Desa Kebesani, dimana pengembangan Hutan Ampupu menjadi destinasi wisata baru tetap dijaga dan dilestarikan sesuai budaya “Pire -Bhisagia” hal ini berdasarkan adat dan budaya lokal yang patut dipertahankan dan dijaga seesuai kebiasaan nenek moyang sejak dahulu kala dengan demikian diharapkan pengembangan wisata hutan ampupu tersebut dapat memberikan nilai

tambah bagi aktivitas ekonomi bagi masyarakat desa kebesani dan sekitarnya sesuai pembangunan berkelanjutan. Secara rinci dapat dilihat pada grafik 4.7 berikut :

Grafik 4.7.
 Persepsi Masyarakat Ende Lio Terhadap konsep Pelestarian dan pengembangan Hutan wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal

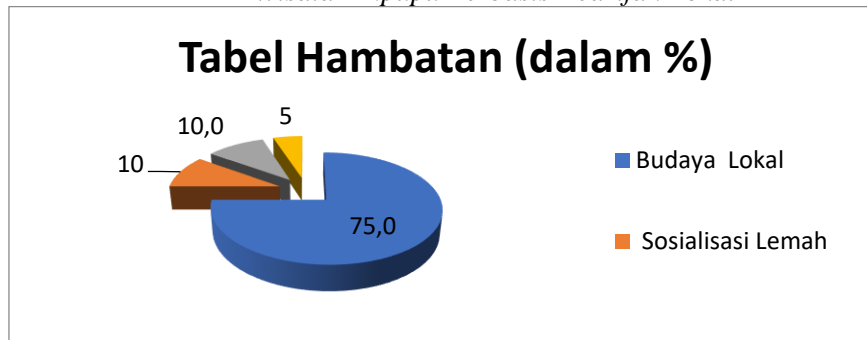


Sumber : Hasil Penelitian 2022 (data hasil olahan)

4.4 Hambatan Masyarakat Terhadap Pemahaman Konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan wisata Ampupu Berbasis Kearifan lokal

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang terpilih dalam penelitian ini yakni dari 160 responden ketika ditanya mengenai hambatan dan alasan sehingga mereka memilih opsi – opsi sesuai dengan jawaban responden maka hasil analisis menunjukkan bahwa: 75 % responden menyatakan yang menjadi hambatan adalah Budaya lokal, 10 % menyatakan lemahnya sosialisasi tentang konsep pelestarian dan pengembangan hutan wisata berbasis kearifan lokal , 10 % responden menyatakan yang menjadi hambatan adalah perbedaan paradigma tentang konsep pelestarian hutan, 5 % responden menyatakan bahwa yang menjadi hambatan adalah kebijakan anggaran yang tidak memihak pada upaya pelestarian hutan .Grafik 4.8 menunjukkan hasil analisis hambatan yang dhadapi masyarakat terhadap konsep pelestarian dan pengembangan Hutan Wisata Ampupu Berbasis Kearifan Lokal.

Grafik 4.8.
 Hambatan yang dihadapi Masyarakat Terhadap konsep Pelestarian dan Pengembangan Hutan
 Wisata Ampupu Berbasis Kearifan Lokal



Sumber : hasil Penelitian 2012 (data hasil olahan)

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa persepsi yang berbeda-beda dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa kekeliruan dalam pemahaman konsep dapat menghambat persepsinya dalam pengembangan hutan berbasis kearifan lokal ke depan. Namun di lain pihak terdapat sikap ataupun pandangan-pandangan masyarakat yang dinilai dapat mendukung proses pelestarian dan Pengembangan Hutan Wisata Ampupu Kebesani, yang menjadi modal bagi pejuang pelestarian dan perlindungan hutan wisata berkelanjutan. Dengan demikian maka perlu adanya kerjasama dalam membangun jejaring kemitraan diantara stakeholder guna memberikan pemahaman dan keyakinan penuh bagi masyarakat marginal guna mewujudkan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Adanya keinginan untuk melakukan pengolahan hutan berbasis kearifan lokal, 2) Minimnya sosialisasi dari fasilitator dan dukungan stakeholder guna memberikan pemahaman terhadap kelompok masyarakat marginal untuk pengelolaan hutan, 3) Perlunya pemerintah membantu masyarakat dengan berbagai kebijakan agar tetap melindungi tradisi yang diwariskan oleh masyarakat sebelumnya. 4) Pengembangan pelestarian

hutan menjadi destinasi wisata berbasis kearifan lokal perlu diperhatikan secara khusus terkait mitos dan budaya masyarakat adat Desa Kebesani, dimana pengembangan Hutan Ampupu menjadi destinasi wisata baru tetap dijaga dan dilestarikan sesuai budaya “Pire -Bhisagia” dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi aktivitas ekonomi bagi masyarakat desa kebesani dan sekitarnya sesuai pembangunan berkelanjutan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya memberikan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat dari pihak yang berkompeten guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep pelestarian dan pengembangan hutan berkelanjutan berbasis kearifan lokal
2. Sosialisasi harus mengakomodir/ bekerja sama dengan stakeholder seperti pemangku adat, pemimpin agama, pengambil kebijakan baik tingkat kecamatan dan kepala desa . Politisi dan akademisi
3. Perlu disusun program kebijakan dan program dari pemerintah di daerah terkait Pengembangan pelestarian hutan menjadi destinasi wisata berbasis kearifan lokal yang berkesinambungan
4. Perlu adanya dukungan keuangan dari pemerintah setempat guna menunjang sektor pariwisata di daerah yang dapat mendorong peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat dan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

REFERENSI

- Agus, S. (2011). *Menejemen Penyelenggara Hotel Seri Menejemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, B. R., & Sunarto. (2007). *Pengantar Statistika Untuk penelitian : Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Aprilia, T. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamdan, Ahmad, A., & Mahbub, A. S. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Status Kawasan Suaka Margasatwa Ko'mara Kabupaten Takalar. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 9(2), 105-113.

- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi. *JUMPA*, 06(01), 63-86. doi: <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2019.v06.i01.p04>
- Hermanto, S. (2017). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Moi* (Vol. 6-7): Book Online.
- Leftungun, N. Y., Widodo, A. P. E., & Wambrauw, L. T. (2021). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Loal Terhadap Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan-Kawasan Cagae Alam Kabupaten Teluk Bintuni. *Cassowary*, 4(2), 190-204.
- Nona, R. V., Ambarawati, I. G. A. A., Darmawan, D. P., & Budiasa, I. W. (2018). Realizing Regional Food Security Through Community Food Business Development in East Nusa Tenggara Province, Indonesia. *International Journal of Agriculture System*, 6(2), 146-155. doi: 10.20956/ijas.v6i2.1593
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rakhmat, J. (2009). *Psikologi Komunikasi* Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sagajoka, E., & Banda, F. L. (2019). Analysis of the Characteristics and Development Disparitas Among Districts /Cities in East Nusa Tenggara Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(02), 186-197.
- Soerjonno, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Suparmini, Setyawati, & Sumunar, D. R. S. (2013). Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora.*, 18(1), 8-22.
- Suryana, N., K, Assegaf, S. U., & Ariani. (2014). Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani pada Agroekosistem Lahan Kering (Kajian Sosiologisdi Kota Tarakan). *Magrobis Journal*, 14(2).
- Suyitno. (2006). *Perencanaan Wisata*. Yogyakarta: Kanisius.